

ANALISIS REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA BITUNG

Oleh:

Ardon Fridolin Honga¹
Ventje Ilat²

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: ¹ardonfhonga@yahoo.co.id
²ventjeilat@yahoo.com

ABSTRAK

Pemerintah daerah dalam melaksanakan penganggaran harus mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keuangan daerah pada dasarnya adalah bagian dari sistem keuangan negara, daerah lebih bebas dan leluasa dalam pengelolaan keuangannya. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisa dan mengetahui realisasi pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota Bitung. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan mempelajari akuntansi sektor publik ataupun sistem akuntansi pemerintahan yang diterapkan di lapangan menurut analisis rasio-rasio keuangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) Pemerintah Kota Bitung dimana pada saat laporan realisasi anggaran diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku serta untuk pertanggung jawaban, BPK-BMD Kota Bitung membuat laporan keuangan untuk dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APBD pemerintah kota Bitung terrealisasi dengan baik karena realisasi anggaran tidak melebihi target yang dianggarkan. Pemahaman teknis tentang realisasi kinerja keuangan pemerintah yang baik yaitu dengan menerapkan sistem akuntansi pemerintahan. Realisasi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan realisasi kinerja keuangan telah dilaksanakan dengan baik dalam laporan realisasi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: kinerja sektor publik, keuangan, belanja, pendapatan

ABSTRACT

Local governments in implementing budgeting should refer to local regulations on the main points of financial management. Local governments must develop Revenue and Expenditure (Budget). Finance area is basically part of the financial system, more free and unrestricted areas in financial management. The purpose of this research is to analyze and determine the realization of government revenue and expenditure Bitung. The method used is quantitative descriptive analysis by studying public sector accounting or governmental accounting system applied field according to financial ratios. Based on the research that has been done, the Financial Management Board and Regional Property (CPC-BMD) Bitung City Government at which time the budget realization report applied and implemented in accordance with the applicable rules as well as for accountability, CPC-BMD Bitung financial reports for accountability. The results showed that the city government budget Bitung well eventuated because the realization of the budget does not exceed the budgeted targets. Technical understanding of the financial performance of the realization of good government is to implement the government accounting system. In the conclusion, that the realization of budget revenues, budget and actual financial performance has been applied or implemented properly in accordance with the budget realization procedures.

Keywords: public sector performance, financial, expenditures, income

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya meningkatkan kenyamanan dan keamanan, mutu pendidikan, kesehatan maupun keimanan.

Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara lebih lanjut memperjelas bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran serta pengelola bendahara umum negara/daerah. Sehubungan itu, pemerintah pusat maupun setiap pemerintah daerah perlu menyelenggarakan akuntansi dalam suatu sistem yang pedomannya ditetapkan oleh menteri keuangan untuk lingkungan pemerintah pusat dan oleh menteri dalam negeri untuk lingkungan pemerintah daerah.

Dalam rangka memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pembendaharaan, setiap pejabat menyajikan laporan keuangan diharuskan memberi pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan yang bersangkutan. Menteri/pemimpin lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala satuan kerja perangkat daerah harus secara jelas menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan informasi yang termuat pada laporan keuangan telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan pemerintah ini merupakan landasan bagi penyelenggaraan kegiatan akuntansi mulai dari satuan kerja pengguna anggaran, penyusun laporan keuangan oleh entitas pelaporan dan penyajian kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit, hingga penyampaian rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Namun, segala hal yang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD oleh legislatif atau penggunaan laporan tersebut oleh pihak-pihak terkait tidak cakup pengaturannya dalam peraturan pemerintah ini

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis anggaran pendapatan dan belanja pemerintah kota Bitung.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Nordiawan (2010:125) sistim akuntansi pemerintahan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan atau menggunakan aplikasi komputer. Mursyidi (2009) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pada Permendagri No.13 tahun 2006, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember.

Konsep Anggaran

Mardiasmo (2005:65) mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, dan penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Peran strategi anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik sangatlah strategis. Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi keinginan tersebut sering kali terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki.

Struktur APBD

Halim dan Iqbal (2012:85) Kebijakan penyusunan anggaran didasarkan pada struktur dari APBD yang terdiri atas :

1. Pendapatan daerah
2. Belanja daerah
3. Pembiayaan daerah

Pendapatan daerah meliputi semua uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, serta merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Belanja daerah mencakup semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan uang yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kinerja APBD

Bastian (2006:274) menyatakan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Analisis Pendapatan

Mahmudi (2006:121) Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti kemandirian keuangan daerah tinggi maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah memberikan pelayanan publik yang berkualitas, melakukan investasi pembangunan jangka panjang, dan sebagainya. Oleh karena itu perhatian terhadap manajemen pendapatan dan analisis pendapatan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah. Melalui laporan realisasi anggaran maka dapat dilakukan analisis pendapatan daerah antara lain dengan cara:

1. Analisis varians (selisih) anggaran pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu

pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. Dalam analisis selisih anggaran pendapatan, hal utama yang perlu dilakukan oleh pembaca laporan adalah:

- Melihat besarnya selisih anggaran pendapatan dengan realisasinya baik secara nominal maupun presentase
- Menetapkan tingkat selisih yang dapat ditoleransi atau dianggap wajar
- Menilai signifikan tidaknya selisih tersebut jika dilihat dari total pendapatan
- Menganalisis penyebab terjadinya selisih anggaran pendapatan

2. Analisis Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Analisis Belanja

Mahmudi (2006:134) Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah melakukan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*). Se jauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Dengan digunakannya sistem penganggaran berbasis kinerja, semangat untuk melakukan efisiensi (penghematan) atas setiap belanja mutlak harus tertanam dalam jiwa setiap pegawai pemerintah daerah. Pemerintah tidak perlu lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berakibat terjadinya pemborosan anggaran, tetapi hendaknya berorientasi pada *output* dan *outcome* dari anggaran. Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis belanja antara lain berupa :

1. Analisis Varians Belanja

Dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam nilai nominalnya atau persentasenya. Selisih anggaran belanja dikategorikan dua jenis, yaitu: 1) selisih disukai (*favourable variance*), dan 2) selisih tidak disukai (*unfavourable variance*). Dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya maka disebut *favourable variance*, sedangkan jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya maka dikategorikan *unfavourable variance*. Hal penting yang harus diperhatikan dalam analisis varians adalah :

- Mempertanyakan alasan terjadinya varians. Apakah selisih tersebut cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan?
- Berapa besarnya varians, apakah jumlahnya signifikan atau tidak?
- Berapa tingkat selisih (variens) yang bisa ditoleransi?

2. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio belanja langsung Thdp Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Tdk Langsung Thdp Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3. Analisis Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Penelitian Terdahulu

1. Santosa (2014) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kemampuan kinerja keuangan DPPKA Kabupaten Sangihe. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif untuk mengukur kinerja keuangan dengan rasio dan analisis keuangan. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan DPPKA pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami peningkatan dan penurunan walaupun tidak signifikan. Pemerintah Kabupaten Sangihe harus meningkatkan PAD agar keuangan pemerintah meningkat dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat.
2. Lomboan (2014) dengan judul Analisis Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui tingkat varians (selisih), pertumbuhan Belanja Langsung dan Efisiensi Belanja Langsung yang terjadi pada Dinas Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja langsung dari Dinas Kesehatan dapat dikatakan efisien. Sebaiknya pimpinan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara tetap mempertahankan atau meningkatkan program-program dengan perencanaan yang matang dan kinerja yang harus efisien.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, untuk menjelaskan dan menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bitung.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi latar belakang masalah dalam penelitian ini.
2. Merumuskan masalah dalam penelitian ini.

3. Mencari literatur-literatur yang terkait dalam penelitian ini.
4. Mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian ini pada Pemerintah Kota Bitung.
5. Menganalisa APBD Pemerintah Kota Bitung.
6. Menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Menurut Kuncoro (2009:145) jenis data dibedakan menjadi :

1. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka).
2. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Namun karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar data dapat diproses lebih lanjut. Data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa perhitungan.

Sumber Data

Sumber data penelitian dapat mempengaruhi dalam suatu proses penelitian. Menurut Kuncoro (2009:148), sumber data penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.
2. Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2013.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian adalah sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara
Teknik ini dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan staf atau pemimpin untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.
2. Teknik Dokumentasi
Teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari buku-buku, literatur, jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Metode Analisis Data

Sugiyono (2008:67) metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis data yang bersifat deskriptif dan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk dapat mengetahui gambaran tentang APBD pemerintah Kota Bitung T.A 2013 dan membandingkan data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut dengan landasan teori dari literatur kemudian menarik kesimpulan dari apa yang telah didapat dari penelitian tersebut dan memberikan beberapa saran.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Memperoleh gambaran umum dari objek penelitian secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada.
- c. Mempelajari data yang diterima dari objek penelitian.
- d. Mengolah data yang diterima dari objek penelitian.
- e. Membandingkan hasil yang diperoleh dengan teori yang ada.
- f. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian**

Data yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013.

1. Analisis Varians Pendapatan**Tabel 1. Analisis Varians Pendapatan Kota Bitung Tahun 2013**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2013	635.629.065.296,00	651.336.944.328,88	102,47

$$= \frac{\text{Rp.651.336.944.328,88}}{\text{Rp.635.629.065.296,00}} \times 100\%$$

$$= 102,47\%$$

Analisis varians, secara umum kinerja pendapatan pemerintah kota Bitung dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan target anggaran pendapatan ditahun 2013 yang mana memiliki presentase 102,47%.

Sumber : BPK-BMD Kota Bitung

2. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi**Tabel 2. Derajat Desentralisasi Kota Bitung**

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	(%)
2013	55.173.113.990,88	651.336.944.328,88	8,47

$$= \frac{\text{Rp.55.173.113.990,88}}{\text{Rp.651.336.994.328,88}} \times 100\%$$

$$= 8,47\%$$

Perhitungan diatas terlihat bahwa derajat desentralisasi kota Bitung dapat dikatakan rendah. Tingkat derajat desentralisasi pada tahun 2013 yaitu 8,47 %.

Sumber : BPK-BMD Kota Bitung

3. Analisis Rasio Efektivitas Pajak Daerah**Tabel 3. Efektifitas Pajak Daerah Kota Bitung Tahun 2013**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2013	16.888.970.257,00	26.162.693.540,00	154,91

$$= \frac{\text{Rp.26.162.693.540,00}}{\text{Rp.16.888.970.257,00}} \times 100\%$$

$$= 154,91\%$$

Perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa dinas pendapatan daerah cukup efektif dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan dengan rasio efektivitas pajak daerah yaitu 154,91 %.

1. Analisis Varians Anggaran Belanja

Tabel 4. Analisis Varians Anggaran Belanja Kota Bitung Tahun 2013

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2013	657.391.442.157,50	611.492.465.168,49	94,01

$$= \frac{\text{Rp.611.492.465.168,49}}{\text{Rp.657.391.442.157,50}} \times 100\%$$

$$= 94,01\%$$

Sumber : BPK-BMD Kota Bitung

Analisis varians memberikan informasi tentang perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran. Pemerintah daerah dapat dinilai baik kinerja belanjanya tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja belanja yang kurang baik.

2. Analisis Kesorasian Belanja :Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Tabel 5. Belanja Langsung Kota Bitung Tahun 2013

Tahun	Belanja Langsung (Rp)	Total Belanja (Rp)	(%)
2013	303.861.408.758,49	611.492.465.168,49	49,6

$$= \frac{\text{Rp.303.861.408.758,49}}{\text{Rp.611.492.465.168,49}} \times 100\%$$

$$= 49,6\%$$

Tabel 6. Belanja Tidak Langsung Kota Bitung Tahun 2013

Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Total Belanja (Rp)	(%)
2013	307.631.056.410,00	611.492.465.168,49	50,3

$$= \frac{\text{Rp.307.631.056.410,00}}{\text{Rp.611.492.465.168,49}} \times 100\%$$

$$= 50,3\%$$

Sumber: BPK-BMD Kota Bitung

Perhitungan diatas dapat terlihat bahwa untuk tahun 2013 sebagian besar dana dimiliki pemerintah dialokasikan untuk belanja tidak langsung relatif kecil dibandingkan rasio belanja tidak langsung. Rasio untuk belanja langsung yaitu 49,6 % sedangkan untuk belanja tidak langsung yaitu 50,3%.

3. Rasio Efisiensi Belanja

Tabel 7. Efisiensi Belanja Kota Bitung Tahun 2013

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	(%)
2013	657.391.442.157,50	611.492.465.168,49	93,01

$$= \frac{\text{Rp.611.492.465.168,49}}{\text{Rp.657.391.442.157,50}} \times 100\%$$

$$= 93,01\%$$

Perhitungan diatas terlihat bahwa pemerintah kota Bitung telah melakukan efisiensi belanja yang dibuktikan dengan rasio efisiensi pada tahun 2013 berada di bawah 100%, dengan presentase 93,01%.

Sumber : BPK-BMD Kota Bitung

Pembahasan

Realisasi Pendapatan kota Bitung dapat dikatakan relatif baik dengan adanya beberapa aspek pendapatan yang dapat mempengaruhi lajunya pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam hal ini penulis meneliti dengan beberapa analisis rasio-rasio untuk mengetahui akan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari analisis varians, secara umum realisasi kinerja pendapatan pemerintah kota Bitung tahun 2013 dapat dikatakan baik. Realisasi tingkat derajat desentralisasi pada tahun 2013 menunjukkan bahwa penggalan pendapatan asli daerah masi rendah karena tidak realisasinya tidak mencapai target rencana anggaran. Pemerintah kota Bitung harus lebih berupaya lagi untuk dapat meningkatkan PAD dengan menggali potensi-potensi atau meningkatkan sumber daya manusia yang ada untuk mengelola PAD nya. Realisasi Efektivitas pajak daerah kota Bitung pada tahun 2013 dapat dikatakann efektif baik dalam merealisasikan pajak daerah sesuai dengan yang dianggarkan.

Realisasi Kinerja belanja pemerintah kota Bitung dilihat dari beberapa hasil yang telah penulis analisis maka belanja pemerintah kota Bitung bisa dikatakan relatif baik. Realisasi Belanja pemerintah kota Bitung tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan atau yang direncanakan. Berdasarkan hasil penelitian dari penulis bahwa realisasi anggaran belanja Tahun 2013 melalui perhitungan varians anggaran belanja tidak melebihi anggaran yang direncanakan. Pemerintah daerah kota bitung pada tahun 2013 dana milik pemerintah sebagian besar dialokasikan untuk belanja langsung relatif kecil dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Berdasarkan analisis penulis bahwa pemerintah kota Bitung telah melakukan realisasi efesiensi anggaran belanja pada tahun 2013 dengan baik. Dari hasil tersebut maka dapat dikatan bahwa pemerintah kota Bitung dapat mengendalikan belanja daerah dari target yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tidak mengurangi tujuan dan sasaran dari program yang telah direncanakan dari awal.

Hasil perhitungan dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan kepala daerah mempunyai wewenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD. Dari hasil penelitian terdahulu Lomboan (2014) bahwa tingkat efisiensi belanja pada tahun 2010-2013 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara tidak jauh berbeda dengan ketercapaiannya efisiensi belanja langsung Pemerintah kota Bitung dengan hasil dibawah rata-rata 100% sehinggah dapat dikatakan efisien. Sedangkan Santosa (2014) pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Sangihe masih lebih rendah dibandingkan pemerintah Kota Bitung.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan yang menjadi objek penelitian adalah :

1. Realisasi Kinerja pendapatan daerah pemerintah kota Bitung dilihat dari sisi pendapatan dengan menggunakan analisis varians ditahun 2013 secara umum dapat dikatakan cukup baik dan terrealisasi. Pemerintah kota Bitung melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah ataupun melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung telah melaksanakan dan memberikan kinerjanya dengan memperdayakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan penuh rasa tanggungjawab.
2. Realisasi Kinerja belanja pemerintah kota Bitung dilihat dari analisis varians secara umum realisasi kinerja pemerintah kota Bitung dapat dikatakan baik karena realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. Realisasi Kinerja belanja pemerintah kota Bitung melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah atau Dinas Belanja Umum telah menjalankan tanggungjawab sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan dapatkan dikatakan terrealisasikan karena tidak melebihi anggaran belanja yang direncanakan.
3. Realisasi Kinerja Keuangan Pemerintah kota Bitung selama tahun 2013 berlangsung sangat efektif dengan memberikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pemerintah daerah kota Bitung menjalankan tanggungjawab dalam hal mengelola keuangan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah cukup baik dan relatif tercapai setiap target keuangannya.

Saran

Dengan mendasari pada kesimpulan maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah kota Bitung perlu lebih berusaha untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penggalian potensi-potensi baru daerah dan pengembangan potensi baru daerah.
2. Bagi penelitit selanjutnya disarankan untuk menambah tahun penelitian agar analisis terhadap kinerja pemerintah dapat mendapat gambar kinerja pemerintah yang jelas. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambah rasio-rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah kota Bitung.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- BPK-BMD. 2014. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013. Pemerintah Kota Bitung.
- Halim Abdul, Muhamad Iqbal. 2012, *Pengelolaan Keuangan Negara*. Penerbit Bulak Sumur. NPP STIM YKPN
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis? Edisi 3*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Lomboan Mira Syurtika. 2014. Analisis Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA* ISSN 2303-1174, Vol 2. Akses tgl 3 September 2014. Hal.952-961
- Mahmudi. 2006. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press. Yogyakarta

- Nordiawan Deddi, Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13. Tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Jakarta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis. Cetakan ke dua belas*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Santosa Oldison, 2014. Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA* ISSN 2303-1174, Vol 2. Akses tgl 3 September 2014. Hal 1512.
- Undang-undang. 2004. No.1. Tentang perbendaharaan. id.slideshare.net/atambua/uu-no-1-tahun-2003. Diakses 4 Desember 2013. Presiden Republik Indonesia. Jakarta

